

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Wahyu Septyan dan PT Narendra Dewa Yoga kepada pekerja *outsourcing* meliputi:
 - a. perlindungan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan
 - b. perlindungan terhadap norma kerja yang terdiri dari waktu kerja, istirahat, cuti kerja, sistem pengupahan dan perjanjian kerja.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Wahyu Septyan kepada pekerja *outsourcing* adalah:

- a. memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja melalui Jamsostek,
- b. memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Bengkulu,
- c. memberikan THR sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. menerapkan waktu kerja sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- e. memberikan hak cuti.

Hubungan kerja antara PT. Wahyu Septyan dan pekerja *outsourcing* dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Seharusnya perjanjian kerja yang dibuat adalah dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu

Tidak Tertentu (PKWTT) karena pekerjaan seperti tenaga *security* dan *celaning service* adalah jenis pekerjaannya bersifat tetap. Disamping itu PT. Wahyu Septyan tidak mencatatkan perjanjian kerja tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu sehingga perlindungan hukum secara preventif terhadap pekerja *outsourcing* tidak dapat terwujud. Sedangkan pada PT. Narendra Dewa Yoga, perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja *outsourcing* masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

- C. Masih ada pekerja *outsourcing* yang tidak terdaftar dalam Jamsostek, sehingga perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan bagi pekerja *outsourcing* tersebut tidak terlaksana.
- D. Waktu kerja yang diterapkan oleh PT. Narendra Dewa Yoga kepada pekerja *outsourcing* yang bekerja sebagai *security* di Universitas Bengkulu adalah 7 jam dalam 1 hari, selama 6 (enam) hari yaitu hari Senin s.d hari Sabtu, dengan total jam kerja adalah 42 (empat puluh dua) jam.
- E. Upah yang diberikan oleh PT. Narendra Dewa Yoga kepada pekerja *outsourcing* adalah sebesar Rp.930.000 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Upah tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: D.308.XIV tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2013, yaitu sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya

pekerja *outsourcing* PT. Narendra Dewa Yoga berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 (satu) bulan dari gaji pokoknya, namun dalam praktiknya pekerja *outsourcing* PT. Narendra Dewa Yoga hanya mendapatkan THR sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

F. Dalam melaksanakan hubungan kerja, PT. Narendra Dewa Yoga dengan pekerjanya tidak ada membuat perjanjian kerja secara tertulis. Hubungan kerja yang diterapkan hanya berdasarkan asas kekeluargaan.

- b) Perlindungan hukum oleh SPSI Kota Bengkulu belum dapat dirasakan oleh para pekerja di PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa Yoga. SPSI Kota Bengkulu beralasan hal tersebut dikarenakan para pekerja pada PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa yoga belum terdaftar sebagai anggota SPSI Kota Bengkulu. Selain itu SPSI Kota Bengkulu belum mendapat informasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa yoga terhadap pekerjanya. Oleh karena itu para pekerja pada PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa yoga belum mendapatkan perlindungan hukum dari SPSI Kota Bengkulu. Adapun alasan Pekerja tidak mau bergabung menjadi anggota SPSI karena khawatir kehilangan pekerjaan, takut kontraknya tidak diperpanjang dan takut di PHK.

Perlindungan hukum oleh Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu juga belum dirasakan oleh para pekerja PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa Yoga karena masih ada hak-hak para pekerja tersebut yang belum diberikan oleh PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa

Yoga. Selaku pengawas pelaksanaan Undang-Undang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu masih lemah dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa Yoga yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa yoga segera memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka memperbaiki sistem kerja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, diantaranya:
2. Harus dibuat perjanjian kerja yang jelas antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja *outsourcing* apakah dalam bentuk PKWT ataupun PKWTT, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan harus mencatatkan perjanjian kerja tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu.
3. Upah dan tunjangan-tunjangan yang diberikan sebaiknya disesuaikan dengan Upah Minimum Minimum Provinsi Bengkulu.
4. Waktu kerja lembur dan penghitungan waktu kerja lembur harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Harus mengikutsertakan seluruh para pekerja dalam program Jamsostek atau ke dalam asuransi yang lain agar menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja
2. Diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur secara lengkap mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan *outsourcing*.
3. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, SPSI harus berperan aktif dan peka dalam memperjuangkan hak-hak pekerja termasuk hak-hak pekerja *outsourcing*. Solidaritas dan perjuangan SPSI harus mencerminkan kepentingan bersama dalam rangka melindungi pekerja dari kesewenangan pengusaha.
4. Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu harus lebih tegas dalam menindak perusahaan *outsourcing* yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial dan melindungi pekerja maka hukum ketenagakerjaan harus ditegakkan, oleh karena itu perlu ada usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai penegak hukum ketenagakerjaan, dengan cara menambah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan, memberikan sarana maupun fasilitas serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta peningkatan kompetensi pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andry Harijanto Hartiman, dkk., 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Asriwijayanti, 2011, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Bandung: Penerbit Lubuk Agung.

-----, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djoko Triyanto, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung: Mandar Maju.

Iftida Yasar, 2008, *Sukses Implementasi Outsourcing*, Jakarta: PPM Manajemen.

-----, 2012, *Outsourcing Tidak Akan Pernah Bisa Dihapus*, Jakarta: Pelita Fikir Indonesia.

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Komang Priambada, 2008, *Outsourcing Versus Serikat Pekerja*, Jakarta: Alih Daya Publishing.

Libertus Jehani, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Jakarta: Forum Sahabat.

-----, 2007, *Hak-Hak Pekerja Bila di-PHK*, Jakarta: Visi Media.

Moh. Syaufii Syamsuddin, 2004, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Jakarta: Sarana Bhakti Persada.

M. Yamani, 2009, *Bahan Ajar Hukum Perburuhan*, Bengkulu: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Bengkulu Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara.

Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakrata: DSS Publishing.

Zainal Asikin *et all*, 2002, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;

UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34680)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138).

Kepmenakertrans Nomor Kep-102/Men/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Kepmenakertrans Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia 1945.

Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011.

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: D.308.XIV tahun 2012 tentang Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2013.

C. INTERNET

<http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Februari 2013.

<http://id.answers.yahoo.com/>diakses tanggal 8 Februari 2013

Indah Budiarti, 2008, *Serikat Pekerja*, [http://unionism.wordpress.com/serikatpekerja/Revised Edition/April-2008](http://unionism.wordpress.com/serikatpekerja/RevisedEdition/April-2008).

Muhaimin Iskandar, *Pekerja Outsourcing dan Pekerja Kontra Berhak Mendapat THR*, www.depakertrans.go.id-news.html,49,naker, diakses pada tanggal 27 Agustus 2013.

www.metrotvnews.com, *May Day, Buruh Terus Suarakan Tuntutan Hidup Layak*, Diakses pada tanggal 2 Mei 2013.